

# STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DALAM MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN KOTA PALU

Fahmi, H. Chairil Anwar, dan Eko Jokolelono

*fahmiperencanaan@gmail.com*

*Program Studi Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*The purposes of this research is (1) to know and analyse strategy of micro enterprises development in accelerating development of Palu city; (2) to know and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the development of micro enterprises currently nature accelerate the development of the city of Palu; and (3) to know and analyze the development strategy formula that should be done by micro enterprises in accelerating the development of Palu city. This was a qualitative and quantitative research (mix methods) with 20 informants consisting of 16 businessmen in Palu, 4 employees of Cooperative Department and Micro Enterprises of Palu. Data analysis used was interactive approach and SWOT analysis. The research findings reveal that strategy form used recently for micro enterprises development in accelerating development of Palu is combination of strengths-opportunities strategies by optimizing strengths through the use of opportunities with action plan strategies as follows: (1) ease of capital access for bussiness scale development; (2) ease of access to capital for increasing market access; (3) the development of human resources to have access to new markets; (4) the development of human resources to have the potential to develop exports; (5) promotion development in order to improve market access; (6) development of business networks to protect businesses from certain types of business; (7) marketing development in order to access new markets; (8) development of partnerships to protect the business of certain types of businesses; and (9) improving access to technology throught the assistance of facilities and infrastructure development.*

**Keywords:** *Strategy, Development, Micro Enterprises, Development.*

## **PENDAHULUAN**

Ketika terjadi krisis ekonomi di tahun 1998, hanya sektor UMKM yang mampu bertahan dari kolapsnya ekonomi, sementara sektor yang lebih besar justru tumbang oleh krisis. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UMKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan

cenderung bertambah (Departemen Koperasi, 2008).

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Melalui bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompertifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada (Departemen Koperasi, 2008).

Adapun alasan-alasan UMKM dapat bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis yaitu: Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah. Kedua,

sebagian besar UMKM mempergunakan modal sendiri dan tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya pada masa krisis keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga tidak berpengaruh terhadap UMKM. Ketiga, dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerjanya. Sehingga para penganggur tersebut memasuki sektor informal dengan melakukan kegiatan usaha yang berskala kecil, akibatnya jumlah UMKM meningkat (Partomo dan Soejodono, 2004:9).

Realitas ketahanan UMKM dalam menghadapi krisis di masa lalu, menjadi sebuah indikator bahwa pengembangan UMKM di Indonesia merupakan prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini selain karena usaha tersebut merupakan tulang punggung sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, ataupun pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

UMKM berkontribusi terhadap 97 persen penyerapan tenaga kerja di Indonesia yang tersebar di sembilan sektor ekonomi Indonesia dan juga memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 40%, serta mempunyai potensi sebagai satu sumber penting pertumbuhan ekspor, khususnya ekspor non-migas (*Indonesia Small Business Research Center, 2003*). Menurut data dari Kementerian Negara Koperasi dan UMKM tahun 2013, sekitar 99 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia berskala UMKM, dan tercatat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 99,4 juta tenaga kerja. Sementara usaha besar menyerap sekitar 2,8 juta pekerja. Peluang pemasukan negara

melalui sektor pajak yang ditarik dari UMKM pun cukup besar. Hal ini terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perpajakan UMKM. Pemerintah memiliki maksud dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, UMKM dapat menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan, maupun kredit perbankan.

Secara praktek, UMKM merupakan kekuatan strategis dan penting untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah. Data Kementerian Negara Koperasi dan UMKM tahun 2015 menunjukkan total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp.8.241,8 triliun dan UMKM memberikan kontribusi sebesar Rp.4.869,5 triliun atau 59,08% dari total PDB Indonesia. Jumlah populasi UMKM Indonesia pada tahun 2015 mencapai 56,53 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 107,65 juta orang atau 97,16 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia.

Kemudian data BPS (2015:25) menunjukkan sumbangan UMKM terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp.75,80 triliun 19,90 persen dari total nilai ekspor. Sampai saat ini perekonomian Indonesia mayoritas ditopang oleh sektor ini. Setidaknya, sektor UMKM tersebut mampu menyerap 70 persen tenaga kerja informal. Sisanya 30 persen bergerak di bidang formal. UMKM telah menyumbang produk ekspor sampai 16 persen.

Kedua data di atas menunjukkan bahwa peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan *output* yang berguna bagi masyarakat. Sesuai data tersebut di atas, berarti kita tidak boleh mengabaikan keberadaan UMKM yang strategis baik secara nasional maupun di daerah. UMKM memiliki posisi penting, bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja

dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu upaya untuk menumbuhkan iklim kondusif bagi perkembangan UMKM khususnya usaha mikro dalam mempercepat pembangunan daerah. Oleh sebab itu, UMKM khususnya usaha mikro perlu dibina, diberdayakan dan dikembangkan karena merupakan penggerak roda perekonomian dan pengembang ekonomi kerakyatan.

Melihat besarnya jumlah pelaku ekonomi dan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja, maka UMKM khususnya usaha mikro layak mendapat perhatian. Berkembangnya UMKM khususnya usaha mikro akan memperkuat struktur ekonomi domestik karena terserapnya angkatan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, memperbesar tingkat permintaan dan meningkatkan pertumbuhan investasi. Meski memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan daerah, mengembangkan UMKM khususnya usaha mikro bukan hal yang mudah. UMKM khususnya usaha mikro memiliki permasalahan yang cukup kompleks, dimana permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM khususnya usaha mikro adalah dalam hal: bidang permodalan, bidang pemasaran, bidang bahan baku, bidang tenaga kerja, dan bidang manajemen.

Hafsah (2010:11) menyatakan bahwa permasalahan internal UMKM meliputi: (a) rendahnya profesionalisme tenaga pengelola usaha UMKM; (b) keterbatasan permodalan dan kurangnya akses terhadap perbankan dan pasar; dan (c) kemampuan penguasaan teknologi yang rendah. Sedangkan permasalahan eksternal, yaitu: (a) iklim usaha yang kurang menguntungkan bagi pengembangan UMKM; (b) kebijakan pemerintah yang belum berjalan sebagaimana mestinya; (c) kurangnya dukungan; dan (d) masih kurangnya pembinaan bimbingan manajemen dan peningkatan kualitas sumber

daya manusia. Penelitian Theng dan Jasmine (2006:8), menunjukkan bahwa penyebab kegagalan UMKM berasal dari faktor-faktor luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan oleh manajemen, dan juga faktor dari dalam perusahaan itu sendiri antara lain *personality short coming*, *financial* dan *operational short coming*.

Najib (2006:3) mengungkapkan faktor penghambat perkembangan UMKM antara lain: (1) kurangnya pengetahuan tentang pasar; (2) *bargaining power* lemah; (3) minimnya modal; dan (4) rendahnya teknologi. Selain itu UMKM juga menghadapi beberapa tantangan eksternal, antara lain: (1) munculnya globalisasi yang berakibat meningkatnya persaingan pasar; (2) lemahnya pengaturan dan penegakan hukum; (3) rendahnya kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk UMKM dalam negeri; dan (4) belum meluasnya dukungan infrastruktur yang memadai bagi sentra-sentra produksi UMKM. Sementara Barbara (2000:5), mengatakan bahwa permasalahan bidang pemasaran, keuangan dan manajemen sangat berpengaruh terhadap pengembangan UMKM.

Tambunan (2002:75), menyatakan bahwa masalah lemahnya manajemen, pemasaran, kekurangan pembiayaan, kekurangan keterampilan, kekurangan bahan baku, serta kelemahan dalam penyerapan teknologi merupakan faktor penghambat UMKM. Idrus, (2013:9) menyebutkan bahwa faktor penyebab kegagalan sektor UMKM untuk berkembang diantaranya adalah: (1) lemahnya kemampuan dalam mengambil keputusan; (2) ketidakmampuan didalam manajemen; (3) kurangnya pengalaman; dan (4) lemahnya pengawasan keuangan.

Berbagai permasalahan di atas juga dialami oleh para pelaku usaha mikro di Kota Palu. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kota Palu periode tahun 2015, ditemukan sebuah fenomena adanya beberapa

permasalahan interen dan eksteren yang dihadapi dalam pengembangan sekitar 4.998 usaha mikro di Kota Palu dalam mempercepat pembangunan daerah Kota Palu. Permasalahan ini diantaranya adalah rendahnya profesionalisme dalam pengelolaan usaha, keterbatasan permodalan, kurangnya akses pemasaran, penguasaan teknologi yang lemah, kebijakan pemerintah belum efektif, dan masih lemahnya manajemen pengelolaan usaha.

Selain itu, sesuai dengan hasil pengamatan awal peneliti di lapangan, permasalahan lainnya yang dihadapi usaha mikro di Kota Palu adalah keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas pemerintah terkait dengan perizinan dan birokrasi serta tingginya tingkat pungutan. Melihat pada segala persoalan yang ada, potensi usaha mikro di Kota Palu yang begitu besar menjadi terhambat. Meskipun usaha mikro di Kota Palu dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat.

Berdasarkan pada pengamatan awal peneliti di lapangan, ditemukan pula sebuah fenomena bahwa adanya liberalisasi perdagangan turut pula menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro di Kota Palu, disebabkan karena tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan usaha mikro di Kota Palu agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk pesaing sehingga *positioning* persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi usaha mikro di Kota Palu saat diberlakukan sistem perdagangan bebas masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang telah mulai dirasakan saat ini. Apabila kondisi ini dibiarkan, usaha mikro di Kota Palu yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan melemah juga.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro di Kota Palu

sesuai dengan pengamatan awal peneliti di lapangan adalah kurangnya akses informasi, khususnya informasi pasar. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal memasarkan produk-produknya, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing di tingkat global. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan usaha mikro di Kota Palu tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga perkembangannya mengalami stagnasi.

Beragam permasalahan dalam pengembangan usaha mikro di Kota Palu tersebut di atas, setidaknya memberikan implikasi pada perkembangan jumlah usaha mikro di Kota Palu selama periode tahun 2012 s/d 2015 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. berikut ini:

**Tabel 1. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Mikro di Kota Palu Selama Periode Tahun 2012-2015**

Skala Usaha	Periode Tahun			
	2.012	2.013	2014	2015
Usaha Mikro/PKL	5.697	2.004	1.345	4.998

Sumber: Dinas Perindagkop & UKM Kota Palu, 2016.

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2012 s/d 2015, perkembangan jumlah unit usaha mikro di Kota Palu cenderung berfluktuasi. Kondisi ini disebabkan karena adanya berbagai hambatan dalam pengembangan usaha mikro berkaitan dengan: (1) akses pasar, (2) modal dan (3) teknologi. Mengatasi hambatan tersebut, maka secara keseluruhan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Palu dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha mikro, antara lain: (1) kondisi kerja, (2) promosi usaha baru, (3) akses informasi, (4) akses pembiayaan, (5) akses pasar, (6) peningkatan kualitas produk dan SDM, (7) ketersediaan layanan pengembangan usaha, (8) pengembangan

*cluster*, (9) jaringan bisnis, dan (10) kompetensi.

Beragam fenomena yang terjadi dalam pengembangan usaha mikro di Kota Palu menunjukkan adanya konflik antara harapan (*das sollen*) dan kondisi nyata (*das sein*) di lapangan, dimana disatu sisi usaha mikro di Kota Palu telah terbukti mampu bertahan dari adanya krisis ekonomi global, sehingga diharapkan dapat menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian daerah namun disisi lain kenyataan saat ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi usaha mikro di Kota Palu sangat banyak dan kompleks.

Untuk mengatasi adanya konflik antara harapan (*das sollen*) dan kondisi nyata (*das sein*) dalam pengembangan usaha mikro di Kota Palu, maka pemerintah Kota Palu saat ini telah memberikan perhatian serius dan sangat besar terhadap sektor usaha mikro terutama dalam pengembangannya mempercepat pembangunan Kota Palu. Mengingat fungsi dan peran usaha mikro di Kota Palu yang memanfaatkan segala macam potensi sumber daya lokal yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di Kota Palu secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Untuk mencapai tujuan percepatan pembangunan Kota Palu melalui pengembangan usaha mikro di atas, maka pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Palu telah mengambil langkah-langkah konkrit yang dibuktikan dengan adanya strategi, program dan rencana aksi (*action plan*) untuk membangun usaha mikro. Beberapa program telah dilakukan misalnya program pelatihan dan pendampingan, akses permodalan, dan bantuan akses pasar bagi usaha tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan didukung pula dengan fenomena-

fenomena yang ada, maka penulis tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam masalah pengembangan usaha mikro di Kota Palu.

Melihat dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini diajukan rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengembangan usaha mikro saat ini dalam mempercepat pembangunan Kota Palu ?
2. Apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman didalam strategi pengembangan usaha mikro saat ini dalam mempercepat pembangunan Kota Palu ?
3. Rumusan strategi pengembangan apa yang sebaiknya dilakukan usaha mikro saat ini dalam mempercepat pembangunan Kota Palu ?

## METODE

Berdasarkan bentuk permasalahannya, penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif (*mixed method*). Jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif menurut Sarwono (2011:87), dapat digabung bahkan mempunyai kelebihan-kelebihan dibanding menggunakan satu jenis penelitian saja. Peneliti dapat menggunakan kekuatan-kekuatan metode tambahan untuk mengatasi kelemahan metode lainnya. Selain itu menurut Sarwono (2011:87), penggunaan jenis penelitian lebih dari satu dimaksudkan sebagai sarana konfirmasi, jika hanya dengan satu jenis penelitian peneliti menganggap temuan riset kurang valid, maka perlu ada jenis penelitian lain untuk konfirmasi lebih lanjut sehingga menghasilkan temuan-temuan riset yang lebih valid.

Peneliti menetapkan informan pada penelitian ini yaitu informan yang terlibat langsung dalam strategi pengembangan usaha mikro di Kota Palu, karena dianggap mengetahui informasi dengan baik tentang strategi pengembangan usaha mikro dalam

mempercepat pembangunan di Kota Palu, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman didalam strategi pengembangan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan di Kota Palu, dan rumusan strategi pengembangan yang sebaiknya dilakukan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan di Kota Palu.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam dengan sumber data atau informan penelitian sebanyak 20 orang, terdiri dari 16 orang pelaku usaha mikro di Kota Palu dan 4 orang pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu.

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis strategi pengembangan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu, adalah menggunakan metode gabungan (*mix methods*) antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.

Penelitian kualitatif menekankan pada pendeskripsian hasil penelitian dalam sebuah pemaparan dengan tolak ukur berpedoman pada hasil wawancara peneliti dengan informan, sedangkan penelitian kuantitatif menekankan penjabaran hasil penelitian melalui nilai-nilai pembobotan tertentu terhadap persepsi informan dalam kuesioner penelitian dengan menggunakan analisis SWOT. Metode gabungan (*mix methods*) dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat keilmiah hasil penelitian, dimana penelitian kualitatif bersifat memfasilitasi penelitian kuantitatif. Hal ini dibenarkan karena menurut Brennan (1992) dalam Sarwono (2011:263) dari pengalaman empiris di lapangan, sudah banyak para ahli metodologi menggunakan metode gabungan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam ilmu pengetahuan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Strategi Pengembangan Usaha Mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu**

Pengembangan usaha mikro di Kota Palu lebih diarahkan pada suatu kebijakan bagaimana membangun kemandirian dari usaha mikro itu. Capaiannya adalah berdasarkan pada visi dan misi pemerintah Kota Palu periode sekarang ini sebagai daya dorong untuk mewujudkan Kota Palu sebagai daerah destinasi atau kota tujuan. Sebagai kota tujuan tentu usaha mikro di Kota Palu diharapkan lebih mampu menjadi faktor unggulan, sehingga nanti ketika masyarakat di luar wilayah Kota Palu berkunjung ke Kota Palu, bisa merasakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha mikro.

Usaha mengembangkan sektor usaha mikro tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Palu melaksanakan beberapa program kegiatan yang merupakan implikasi dari strategi yang telah ditetapkan. Program-program usaha mikro yang lebih ditonjolkan oleh pemerintah Kota Palu melalui dinas terkait adalah program-program berbasis keunggulan komparatif daerah. Pemerintah Kota Palu berusaha mengangkat potensi lokal yang kemudian diharapkan dapat menjadi daya dukung untuk mewujudkan Kota Palu sebagai kota tujuan wisata.

#### **a. Program dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian di atas, tergambar bahwa kualitas SDM pengelola usaha mikro di Kota Palu ditingkatkan melalui program pengembangan kewirausahaan dengan mengadakan pelatihan dan magang yang pelaksanaannya melibatkan OPD terkait sesuai bidang usaha yang dikelola usaha mikro di Kota Palu. Nantinya diharapkan dari kualitas SDM yang ada mampu untuk meningkatkan kualitas produksi. Hal ini merupakan salah satu upaya percepatan karena strategi pengembangan usaha mikro itu untuk pemerintah daerah Kota Palu adalah dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis (bimtek), dan magang kepada kelompok-kelompok usaha mikro yang bergerak di bidang industri kerajinan,

perdagangan, dan makanan olahan (kuliner) berbasis potensi lokal.

Berbagai macam bentuk materi yang disampaikan para narasumber dalam kegiatan pelatihan pengembangan kewirausahaan bagi usaha mikro di Kota Palu, diantaranya adalah pengenalan potensi, motivasi berwirausaha, teknik pemasaran dan pengembangan pasar, teknik promosi yang efektif, dan praktek tentang kewirausahaan. Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha mikro di Kota Palu lebih memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan lebih berani untuk melakukan inovasi-inovasi, serta mampu menjalankan usahanya dengan baik.

#### **b. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Usaha Mikro**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan penelitian tersebut di atas, tergambar dalam mensosialisasikan dukungan Informasi penyediaan permodalan usaha mikro, pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu memposisikan diri sebagai fasilitator atau yang menjembatani para pelaku usaha mikro di Kota Palu dengan pihak perbankan sebagai pemberi modal pinjaman untuk pengembangan usaha mikro. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dan yang menjadi peserta dalam kegiatan ini tentu saja adalah dari para pelaku usaha mikro di Kota Palu, yang mengirimkan utusan yang biasanya adalah pengurus usaha mikro tersebut. Tidak semua unit usaha mikro yang ada di Kota Palu ini di undang menjadi peserta, sebab pelaksanaan sosialisasi ini juga harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Usaha mikro di Kota Palu yang menjadi peserta dalam sosialisasi ini pada umumnya adalah unit-unit usaha mikro yang telah memenuhi kriteria untuk mengikuti kegiatan ini.

#### **c. Pengembangan Jaringan Usaha Mikro**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, tergambar Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Palu dalam mengembangkan usaha mikro berusaha memperluas jaringan usaha mikro di Kota Palu melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pengusaha besar, instansi dan lembaga terkait, pengelola jaringan usaha dengan sistem online dan kementerian terkait di tingkat pusat, dengan tujuan mendorong produk-produk usaha mikro di Kota Palu dalam berbagai macam bidang usaha dapat dikenal, diminati dan dibeli konsumen baik di tingkat pasar nasional maupun di tingkat pasar internasional.

Berbagai macam bentuk jalinan kerjasama (kemitraan) yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam memperluas jaringan usaha mikro di Kota Palu sebagai bentuk strategi pengembangan usaha mikro didalam mempercepat pembangunan Kota Palu, diantaranya adalah bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan lembaga-lembaga lainnya seperti Bukalapak dot.com dan Lazada mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pasar online. Tujuannya agar usaha mikro di Kota Palu tidak ketinggalan di dalam merebut pasar. Hal ini disebabkan karena sekarang ini pasar sudah mengalami pergeseran orientasi dari pasar konvensional menjadi pasar digital.

#### **d. Pengembangan Skala Usaha Mikro**

Hasil wawancara penulis dengan informan, menggambarkan bahwa UMKM di Kota Palu sebagian besar didominasi oleh usaha mikro sehingga sesuai dengan aturan yang ada, pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu diberikan tanggung jawab penuh untuk dapat mengembangkan usaha mikro melalui penguatan pengelolaan usaha akibat dari adanya keterbatasan modal dan tenaga kerja.

#### **e. Penguatan Manajemen Usaha Mikro**

Hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, memberikan gambaran pendampingan-pendampingan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dengan melibatkan lembaga-lembaga lainnya

adalah merupakan salah satu upaya untuk memperkuat manajemen pengelolaan usaha mikro di Kota Palu agar nantinya produk-produk usaha mikro memiliki daya saing untuk merebut pasar tidak hanya di wilayah Kota Palu saja. Selain memperkuat teknologi dan manajemen, para pelaku usaha mikro juga harus memperkuat pasar dengan langkah pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu mendorong para pelaku usaha mikro di Kota Palu bekerjasama dengan pusat-pusat perbelanjaan modern seperti Alfamidi dalam memasarkan produk-produknya. Jadi melalui bantuan jaringan usaha retail besar, produk-produk usaha mikro bisa tersebar di seluruh Indonesia

#### **f. Pengembangan Teknologi Usaha Mikro**

Hasil wawancara penulis dengan informan di atas, menggambarkan bahwa bantuan teknologi tepat guna yang diberikan oleh pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dalam rangka mengembangkan teknologi usaha mikro di Kota Palu harus ramah terhadap lingkungan dan didukung dengan kualitas SDM pengelola usaha mikro di Kota Palu, sehingga pemanfaatan teknologi tepat guna tersebut familiar dan ramah terhadap lingkungan serta mampu memberikan kontribusi pada peningkatan produksi usaha mikro di Kota Palu dengan produk-produk yang efisien dan berkualitas.

Saat ini Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu telah memberikan beberapa bentuk modal bantuan teknologi tepat guna untuk mengembangkan teknologi usaha dalam proses produksi usaha mikro sehingga strategi pengembangan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Palu. Beberapa bentuk modal bantuan teknologi tepat guna tersebut diantaranya adalah pemberian modal usaha untuk pengrajin batik bomba dan tenun bomba dengan teknologi ATBM yang diperuntukkan untuk 2 (dua) kelompok usaha di Kelurahan Pantoloan Boya, bantuan mesin

pemecah batu, bantuan mesin daur nilam, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, saat ini pemerintah Kota Palu sedang mendorong 11 (sebelas) sektor industri kreatif mulai kerajinan bambu, kelapa, rotan, kemudian kerajinan batik bomba, pengelolaan sampah, kerajinan batu, kerajinan keripik, dan kerajinan kerajinan daun silam.

#### **g. Pengembangan Akses Pemasaran Produk Usaha Mikro**

Petikan wawancara penulis dengan informan penelitian, menggambarkan bahwa akses pemasaran dari produk-produk yang di produksi usaha mikro di Kota Palu sudah cukup luas tidak hanya terbatas di wilayah Kota Palu saja tetapi juga telah menyentuh pasar di luar wilayah Kota Palu terutama pada daerah-daerah yang bisa dijangkau dengan transportasi darat. Meskipun demikian, sebagian besar produk-produk usaha mikro di Kota Palu masih dipasarkan sebatas wilayah Kota Palu, terkecuali untuk produk-produk yang memiliki nilai keunikan atau kekhususan tertentu, seperti kerajinan kain tenun batik bomba, bawang goreng, abon ikan orientasi pasarnya sudah banyak keluar wilayah Kota Palu karena telah menjadi trend untuk tingkat nasional.

#### **h. Pengembangan Akses Informasi Usaha Mikro**

Petikan wawancara penulis dengan informan penelitian, memberikan gambaran keikutsertaan produk-produk usaha mikro di Kota Palu dalam pameran-pameran tingkat lokal, regional, nasional dan internasional yang diselenggarakan pemerintah Kota Palu maupun pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha mikro di Kota Palu untuk dapat semakin aktif dan selektif menampilkan produk-produknya dengan mutu, desain, dan harga yang semakin bersaing dengan produk-produk dari daerah lain.

Tujuan dari dilaksanakannya kegiatan promosi produk usaha mikro di Kota Palu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu



serta instansi-instansi terkait lainnya antara lain:

- 1) Sebagai ajang promosi dan pemasaran produk-produk usaha mikro di Kota Palu kepada masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus pangsa pasar nasional maupun internasional.
- 2) Mempromosikan produk-produk usaha mikro di Kota Palu dalam meraih pasar global untuk mengantisipasi masuknya produk-produk yang diproduksi oleh produsen luar negeri.
- 3) Merupakan forum bertukar wawasan baik antar sesama pelaku usaha mikro di Kota Palu, pelaku usaha mikro dengan pengusaha besar maupun dengan masyarakat untuk meningkatkan teknologi, kualitas, dan mutu dari hasil-hasil produk usaha mikro di Kota Palu.

#### **i. Dukungan Kebijakan Pemerintah Kota Palu Pada Usaha Mikro**

Petikawan wawancara penulis dengan informan penelitian, menggambarkan bahwa selain memberikan pendampingan usaha, bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu lainnya dalam mendukung pengembangan usaha mikro di Kota Palu, adalah dengan memberdayakan usaha-usaha mikro binaan di Kota Palu melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi, magang, memberikan bantuan bahan baku, dan memberikan bantuan peralatan, dimana semua kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro di Kota Palu.

#### **j. Dukungan Sarana dan Prasarana Pada Usaha Mikro**

Sesuai hasil petikan wawancara penulis dengan informan penelitian, tergambar bahwa bantuan peralatan kepada para pelaku usaha mikro binaan di Kota Palu adalah merupakan salah satu respon dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dalam memantau dinamika perkembangan usaha mikro di Kota Palu agar tidak mengalami hambatan dalam pengembangannya. Artinya, Dinas Koperasi

dan UMKM Kota Palu memberikan bantuan peralatan produksi kepada para pelaku usaha mikro binaan agar produk-produk usaha mikro yang diproduksi dari segi waktu efisien waktu produksinya dan dari segi kualitas sesuai dengan keinginan konsumen dan tuntutan dinamika permintaan pasar. Selain itu, dibutuhkan juga dukungan infrastruktur jalan untuk memperlancar distribusi produk-produk usaha mikro di Kota Palu ke daerah-daerah pemasaran yang dituju.

#### **k. Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif Bagi Usaha Mikro**

Hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, menggambarkan bahwa dalam mensiasati tingkat persaingan di antara para pelaku usaha di Kota Palu yang semakin kompetitif saat ini, para pelaku usaha mikro di Kota Palu melalui dorongan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu selaku pihak yang membina, berusaha menciptakan iklim persaingan yang kondusif dengan membentuk beberapa komunitas bisnis sendiri. Komunitas bisnis dari para pelaku usaha mikro di Kota Palu ini memiliki tujuan untuk saling memberikan *support* atau dorongan agar usaha-usaha mereka tumbuh dan berkembang dengan baik di tengah derasnya tingkat persaingan yang ada saat ini.

#### **l. Penguatan Usaha Mikro**

Hasil wawancara penulis dengan informan penelitian, menggambarkan bahwa dalam menghadapi liberalisasi perdagangan atau sistem perdagangan bebas masyarakat ekonomi Asean (MEA), pemerintah Kota Palu harus sepenuhnya mendukung penguatan usaha mikro di Kota Palu melalui penguatan kebijakan-kebijakan daerah yang mendorong pengembangan usaha mikro di Kota Palu di dalam menghadapi liberalisasi perdagangan atau masyarakat ekonomi Asean (MEA) tersebut. Penguatan-penguatan kebijakan pemerintah daerah tersebut intinya mengarah kepada penciptaan iklim usaha yang kondusif, penguatan bantuan permodalan dari pemerintah, perlindungan usaha untuk jenis-jenis usaha tertentu, pengembangan

kemitraan, peningkatan pelatihan, pembentukan lembaga khusus, pemantapan asosiasi, dan pengembangan promosi

## **2. Analisis SWOT Strategi Pengembangan Usaha Mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu**

### **a. Analisis Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan)**

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka dapat diketahui hasil analisis SWOT untuk faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dengan jumlah nilai hasil skor adalah sebesar 0,55 (nol koma lima lima) dan kelemahan (*weaknesses*) dengan jumlah hasil skor sebesar 0,45 (nol koma empat lima) dalam strategi pengembangan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu, dengan total nilai hasil skor faktor internal sebesar 2,80 (dua koma delapan nol).

### **b. Analisis Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman)**

Berdasarkan hasil analisis SWOT, maka dapat diketahui total nilai hasil skor faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dengan jumlah nilai hasil skor adalah sebesar 0,64 (nol koma enam empat) dan ancaman (*threats*) dengan jumlah nilai hasil skor adalah sebesar 0,36 (nol koma tiga enam) dalam strategi pengembangan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu dengan nilai sebesar 3,02 (tiga koma nol dua).

## **3. Analisis Penentuan Matriks *Grand Strategy* (Analisis Kuadrant) Strategi Pengembangan Usaha Mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu**

Bentuk strategi yang diprioritaskan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu didalam pengembangan usaha mikro dalam mempercepat pembangunan Kota Palu adalah kombinasi antara strategi Kekuatan-Peluang (*Strengths-Opportunities*) yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (*comparative advantages*) dengan program-program atau rencana aksi sebagai berikut:

(1) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu perlu terus menerus mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi keberadaan/eksistensi usaha mikro. Beberapa upaya tersebut adalah menciptakan ketentraman dan keamanan berusaha, penyederhanaan prosedur perijinan usaha, dan insentif/keringanan pembayaran pajak.

(2) Bantuan Permodalan Pemerintah

Untuk bantuan permodalan pemerintah Kota Palu perlu memperluas skim kredit dengan bunga yang ringan, termasuk skim khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi para pelaku usaha mikro di Kota Palu. Upaya pemerintah melalui program pemberian KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk modal kerja bagi pelaku usaha mikro merupakan salah satu program dan kegiatan strategis yang perlu dikembangkan untuk perkuatan permodalan bagi para pelaku usaha mikro. Disamping itu, pelaku usaha mikro tetap konsisten memanfaatkan jasa-jasa lembaga keuangan untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dana modal ventura. Sebaiknya menggunakan jasa-jasa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun lembaga non bank lainnya.

(3) Perlindungan Usaha Jenis-jenis Usaha Tertentu

Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha mikro (tradisional) yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah (kerakyatan), harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah Kota Palu, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).

(4) Pengembangan Kemitraan

Pengembangan kemitraan dikembangkan, kemitraan yang saling membantu antara

para pelaku usaha mikro di Kota Palu, atau antara para pelaku usaha mikro di Kota Palu dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun luar negeri, untuk menghindari terjadinya monopoli dalam usaha.

- (5) **Pelatihan Pelaku Usaha Mikro**  
Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro di Kota Palu melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan meliputi aspek kewiraswastaan, aspek manajemen, administrasi dan keuangan serta keterampilan teknis produksi dan pengendalian kualitas.
- (6) **Membentuk Lembaga Khusus**  
Membentuk lembaga khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan usaha mikro di Kota Palu dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di Kota Palu.
- (7) **Memantapkan Asosiasi**  
Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- (8) **Mengembangkan Sosialisasi Produk dan Promosi**  
Untuk lebih mudah dalam memasarkan hasil produk usaha mikro di Kota Palu, maka pemerintah Kota Palu melalui instansi-instansi terkait perlu mewadahi hal tersebut dengan kegiatan promosi produk-produk usaha mikro secara periodik dengan melibatkan para pelaku usaha lainnya sebagai mitra usaha. Perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya. Salah satu wujud dukungan pemerintah Kota Palu adalah dengan konsisten mengikutsertakan

produk usaha mikro pada pameran di tingkat lokal, nasional, internasional.

- (9) **Mengembangkan Informasi Pasar dan Jaringan Pemasaran**  
Diperlukan fasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu dalam bentuk penyediaan pusat informasi pasar di sentra-sentra usaha mikro. Selama ini pelaku usaha mikro tidak mempunyai akses dan informasi yang sama terhadap informasi pasar (*assymetric information*) misalnya informasi harga produk, dan permintaan pasar.
- (10) **Penguatan Kelembagaan**  
Perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang serasi antara berbagai pihak (*stakeholders*) dengan pelaku usaha mikro untuk tetap konsisten dalam menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan masalah, dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penguatan kelembagaan usaha mikro baik pada tingkat lokal maupun nasional.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Hasil analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan peluang memiliki nilai skor tertinggi dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman dalam strategi pengembangan usaha mikro mempercepat pembangunan Kota Palu, sehingga sebaiknya posisi dalam Matriks Internal dan Eksternal saat ini dan masa mendatang berada pada kombinasi strategi antara Kekuatan-Peluang. Bentuk strategi relevan digunakan dalam strategi pengembangan usaha mikro mempercepat pembangunan Kota Palu adalah strategi kombinasi antara Kekuatan dan Peluang dengan mengoptimalkan kekuatan untuk dapat memanfaatkan peluang melalui strategi rencana aksi sebagai berikut:

- a. Kemudahan; (i) akses permodalan untuk pengembangan skala usaha, (ii) akses permodalan peningkatan akses pasar.

- b. Pengembangan; (i) SDM untuk memiliki kesempatan mengakses pasar baru, (ii) SDM memiliki potensi mengembangkan ekspor, (iii) promosi untuk dapat meningkatkan akses pasar; (iv) jaringan usaha untuk melindungi usaha dari jenis usaha-usaha tertentu; (v) pemasaran untuk dapat mengakses pasar yang baru, dan (vi) kemitraan untuk dapat melindungi usaha dari jenis-jenis usaha tertentu.
- c. Peningkatan akses teknologi melalui pembangunan sarana dan prasarana.

### **Rekomendasi**

1. Bagi Pelaku Usaha Mikro
  - a. Sebagai pelaku usaha mikro di Kota Palu, perlu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusianya, *inner capacity* nya sebagai bagian dari mutu modal manusia (*human capital*), dimana dapat dilakukan melalui pengembangan diri, pemberdayaan dan pelatihan-pelatihan praktis, serta diikuti dengan perbaikan pada kelembagaan usaha.
  - b. Diharapkan bagi setiap pelaku usaha mikro di Kota Palu dapat membangun etos kerja mendukung pengembangan usaha mikro (tekun, ulet, rajin, budaya kerja dan *smart*).
2. Bagi Perbankan
  - a. Memberikan kemudahan aksesibilitas bagi pelaku usaha mikro di Kota Palu dan memperluas dukungan perbankan.
  - b. Didalam hal penyaluran kredit ke pelaku usaha mikro di Kota Palu, perlu dipikirkan lembaga penjamin semacam asuransi kredit bagi usaha mikro, karena pada umumnya usaha mikro sangat rentang goncangan, sehingga kredit macet sangat menghantui.
3. Bagi Pemerintah Daerah
  - a. Membuka akses seluas-luasnya kepada pelaku usaha mikro di Kota Palu ke sumberdaya finansial, mempermudah perizinan mendorong perkembangan usaha-usaha mikro unggulan.
  - b. Diperlukan regulasi perdagangan untuk mendorong usaha mikro dan upaya

perlindungan usaha mikro. Selain itu regulasi produk-produk usaha mikro dapat akses ke pasar-pasar modern dan pasar regional dan nasional bahkan internasional.

- c. Bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro, perlu dibentuk kawasan ekonomi khusus (*industrial estate/park*) untuk pengolahan dan menampung produk usaha mikro. Dalam kawasan khusus ini industri sedang dan besar dibangun sehingga nilai tambah dari produk usaha mikro dapat diolah dan dinikmati. Terutama bagi produk-produk unggulan yang berdaya saing tinggi (*high competitive advantage*).

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan setulus-tulusnya pada yang terhormat Bapak Haerul Anam, Mohamad Ichwan dan H. Syamsul Bachri, yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Sudaryano R. Lamangkona sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, Bapak Yuslam sebagai Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, Bapak Mursidin Hi. Yusuf sebagai Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu, dan Bapak Gandhi Teguh Persada sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palu. Juga kepada para pelaku usaha mikro di Kota Palu, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama penulis melakukan penelitian.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Badan Pusat Statistik (BPS), 2015. *Statistik Indonesia*, BPS, Jakarta.
- Departemen Koperasi, 2008. *PDB, Investasi, Tenaga Kerja, Nilai Ekspor UMKM di Indonesia*, Depkop, Jakarta.
- Hafsah, Mariana, 2010. *Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Reformasi*,

- Jurnal IPS dan Pengajarannya*, Vol. 2 No. 3, November 2010.
- Idrus, 2013. *Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Pemilihan Setengah Hati*, Akatiga, Bandung.
- Kementerian Koperasi dan UMKM, 2015. *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*, diakses tanggal 08 Februari 2017 dari [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id).
- Najib, Ariawati, 2006. *Usaha Kecil dan Peluang Kerja di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Partomo, T., dan Soejodono, A., 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Ghalia, Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. *Tentang Perpajakan UMKM*.
- Sarwono, Jonathan, 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H., 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Theng dan Jasmine, 2006. *Regulasi dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol4/art7.html>, diakses tanggal 05 Februari 2017.